Bandar Maulana
Jurnal Sejarah Kebudayaan
Vol. 29, No. 2, Oktober 2024
https://e-journal.usd.ac.id/index.php/BandarMaulana

PRODUK BUDAYA SENI KERAKYATAN LEKRA: PERJUANGAN PEREMPUAN DALAM CERPEN-CERPEN *HARIAN RAKJAT* 1950-1965

Pundarika Kanya

Program Studi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma
Jl. STM Pembangunan No. 10, Mrican, Depok, Sleman, 55281, Yogyakarta
Email: pundarikanya@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menyoroti perjuangan perempuan pada cerpen-cerpen yang dimuat dalam *Harian Rakjat* tahun 1950-1965. Perempuan sering dinarasikan sebagai korban dari sistem feodalisme, kolonialisme, imperialisme, dan sistem patriarki. Representasi perempuan dalam cerpen-cerpen ini erat kaitannya dengan ideologi komunis yang dapat memberikan bias maupun sudut pandang baru untuk membingkai perempuan. Aliran realisme sosialis yang diterapkan dalam cerpen-cerpen ini juga turut melatari cerita yang dibuat. Cerpen yang dimuat pada *Harian Rakjat* menjadi alat bagi para pengarang untuk menyuarakan ketidakadilan sosial yang terjadi pada kaum perempuan. Keberpihakan *Harian Rakjat* terhadap perempuan memiliki pengaruh dalam penggambaran tokoh-tokohnya. Melampaui stereotip tradisional, keberdayaan perempuan juga ditampilkan dalam cerpen-cerpen ini salah satunya dengan melakukan peran ganda baik domestik maupun publik.

Kata Kunci: Perjuangan Perempuan, diskriminasi, feminisme, surat kabar *Harian Rakjat.*

ABSTRACT

This study highlights women's struggles in short stories published in Harian Rakjat *in 1950-1965. Women are often narrated as victims of feudalism, colonialism, imperialism, and patriarchal systems. The representation of women in these short stories is closely tied to communist ideology, which can provide bias or new perspectives on framing women. The principles of socialist realism applied in these short stories also further shape the stories created. Short stories published in* Harian Rakjat *served as a tool for authors to voice social injustices that occured to women, with its ideological bias influencing the depiction of the characters. Beyond traditional stereotypes, women's empowerment is also shown in these short stories, particularly through women's dual roles in both domestic and public spheres.*

Keywords: women's struggle, discrimination, feminism, *Harian Rakjat* newspaper.

PENDAHULUAN

Argumen populer terhadap perempuan tidak jauh dari istilah *kanca wingking* yang memiliki arti eksistensi perempuan dipahami sebatas perannya untuk berada di dapur, kasur, dan bereproduksi (Kurniawan, 2014: 137). Pelabelan tersebut merepresentasikan perempuan berada dalam subordinasi laki-laki, bukan melambangkan kesetaraan. Penerapan sistem feodal yang melegitimasi bahwa kedudukan kaum perempuan berada di bawah laki-laki dalam segala aspek kehidupan pun semakin membatasi ruang gerak kaum perempuan. Selain sistem feodal, keterbatasan kaum perempuan untuk memperoleh kesetaraan diperburuk dengan adanya sistem patriarki.

Diskriminasi terhadap perempuan dilipatgandakan ketika kongsi dagang Belanda, *Verenidge Oostindische Compagnie* (VOC) datang. Kedatangan VOC yang semula hanya untuk melakukan kegiatan perdagangan rempah, berubah menjadi penjajahan terhadap bangsa Indonesia dengan memonopoli sistem perdagangan, mengekspoitasi sumber daya alam, dan mempekerjakan manusia secara paksa. Kolonialisme yang dilakukan Belanda menempatkan perempuan sebagai subjek yang inferior dan tak berdaya. Hal tersebut diperkuat dengan adanya praktik pergundikan.

Adapun faktor utama yang mendorong terjadinya praktik pergundikan adalah faktor ekonomi dan sosial. Dapat dikatakan bahwa mayoritas perempuan yang menjadi nyai berasal dari keluarga petani atau kelas bawah dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Karena faktor itulah, mereka rela menjual anak perempuannya kepada Belanda. Sementara itu dari segi sosial, tidak menutup kemungkinan bahwa seorang nyai dapat berasal dari keluarga priyayi. Anak perempuan mereka diserahkan kepada Belanda sebagai bentuk strategi politik untuk mengamankan jabatan serta posisi ayah mereka (Hidayani dan Isriani, 2016: 101).

Terjadinya praktik pergundikan tersebut, mengakibatkan kaum perempuan semakin rentan terhadap eksploitasi. Gundik merupakan perempuan pribumi yang diambil oleh bangsa kulit putih (Belanda), untuk dijadikan budak yang mengurusi rumah tangga maupun sebagai pemuas kebutuhan seks tuannya. Gundik bukanlah pelacur sebab mereka tidak menjajakan diri kepada setiap laki-laki, akan tetapi gundik juga bukan istri sah karena tidak pernah menikah secara resmi. Oleh karena tidak menikah secara resmi, maka para gundik tidak memiliki perlindungan terhadap hak-hak mereka sendiri. Hal tersebut menempatkan para gundik dalam posisi yang rentan akan penindasan dan diskriminasi.

Praktik pergundikan mulai menyusut setelah Belanda menerapkan Politik Etis yang mencakup imigrasi, irigasi, dan edukasi. Namun demikian, kebijakan edukasi yang telah disahkan masih dibatasi dengan memberikan kesempatan pada golongan-golongan tertentu saja, salah satunya adalah kalangan priyayi (Kurniawan, dkk. 2022: 42). Titik balik perlawanan menghadapi penindasan dan eksploitasi seksual pada perempuan mulai muncul setelah ditetapkannya Politik Etis. Berbekal edukasi tersebut, muncullah golongan terpelajar yang kemudian mendirikan organisasi-organisasi bernafaskan nasionalisme untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Munculnya organisasi-organisasi yang bersifat nasionalis dan lahirnya konsepsi 'Indonesia' merupakan langkah awal untuk melawan penjajahan. Tonggak sejarah Kebangkitan Nasional adalah berdirinya Budi Utomo pada 1908.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tahapan penelitian sejarah yang terbagi menjadi lima tahapan yakni, pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013: 70). Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni primer dan sekunder. Sumber primer yang digunakan merupakan cerpen yang mengangkat tema perjuangan perempuan dalam surat kabar *Harian Rakjat* terbitan 1950-1965. Sementara itu, sumber sekunder yang digunakan berupa buku, artikel jurnal, skripsi, serta penelitian historis terkait perjuangan perempuan. Digunakannya cerpen sebagai subjek penelitian menuntut dilakukannya kritik sumber supaya cerpen dapat dijadikan sumber yang sahih. Salah satu caranya adalah dengan melakukan komparasi untuk melihat peristiwa yang melingkupi cerpen tersebut, kemudian cerpen ditempatkan dalam konteks sejarahnya. Pendekatan Feminisme Marxis atau memiliki sebutan lain sebagai Feminisme Sosialis digunakan untuk membantu melihat kontribusi kaum termarginalkan khususnya perempuan, serta memudahkan dalam menganalisis perjuangan perempuan yang ditampilkan dalam cerpen tersebut. Feminisme Marxis melihat penindasan perempuan disebabkan oleh struktur sosial, ekonomi, dan politik.

PEMBAHASAN

Indonesia Pasca Kemerdekaan

Setelah terlepas dari belenggu penjajah, Indonesia dihadapkan dengan permasalahan baru mengenai nasib bangsa ke depannya. Tentu tidak sedikit anggota masyarakat yang menginginkan Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, dan modern, namun dalam mencapai tujuan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kepribadian Indonesia. Kurun waktu 1950-1959 dapat dikatakan sebagai masa percobaan Indonesia untuk mengimplementasikan suatu sistem pemerintahan yang sesuai dengan kepribadian Indonesia. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa ideologi yang berkembang pada saat itu, yakni Nasionalisme, Islam, dan Komunisme. Ideologi Nasionalisme muncul setelah Belanda melaksanakan kebijakan Politik Etis yang mencakup irigasi, imigrasi dan edukasi. Dengan diberinya akses terhadap pendidikan, maka lahirlah golongan-golongan terpelajar yang dalam perkembangannya memantik lahirnya konsepsi akan cinta tanah air yang termanifestasikan dalam Kebangkitan Nasional. Sementara itu, ideologi Islam mulai menjamur sekitar awal abad ke-20 dengan banyaknya organisasi-organisasi bernafaskan nilai-nilai Islam. Dalam perkembangannya, gerakan Islam sejalan dengan nasionalisme untuk berusaha mengusir penjajah. Benturan terhadap Islam dan nasionalisme terjadi ketika dikeluarkan Piagam Jakarta yang mengindikasikan sifat eksklusif dan intoleran pada butir pertama yang berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" (Syarif, 2016: 16). Walaupun penduduk Indonesia didominasi oleh umat Islam, namun beberapa pihak mengkhawatirkan penerapan nilai-nilai Islam yang ketat dapat mengancam prinsip demokrasi, kebebasan beragama, bahkan hak asasi manusia.

Lebih lanjut, masuknya ideologi komunisme dibawa oleh seorang anggota partai buruh Belanda yakni Henk Sneevliet pada tahun 1913. Ideologi tersebut pertama kali disebarkan melalui organisasi berpengaruh Sarekat Islam (SI) Semarang dan *Vereenigingen van Spoor-en Tram Personeel* (VSTP) atau persatuan buruh kereta api (Aidit, 1955: 9). Setahun kemudian, Sneevliet mendirikan *Indische Sociaal-Democratische Vereniging* (ISDV) yang merupakan sebuah organisasi

politik untuk mengumpulkan para intelektual revolusioner Indonesia dan Belanda supaya pengaruh Marxisme semakin meluas (Aidit, 1955: 10). Sedikit-banyak revolusi Marxis yang terjadi pada 1917, turut memberikan pengaruh terhadap kaum proletar Hindia Belanda, kemudian ISDV meleburkan diri menjadi Partai Komunis Hindia. Tidak lama setelah Partai Komunis Hindia terbentuk, pada 23 Mei 1920 Partai Komunis Hindia di bawah pimpinan Semaoen mengganti namanya menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara setengah-jajahan dan setengah-feodal yang mayoritas dihuni oleh kaum akar rumput, dengan demikian, PKI didirikan untuk menyatukan, mengorganisasikan kaum buruh, tani, intelektuil, dan seluruh elemen anti-imperialis dan anti-feodal untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara merdeka, demokratis, makmur, dan maju (Anonim, 1954: 3).

PKI dapat dikatakan mencapai masa keemasannya pada era Demokrasi Terpimpin (1959-1965) ketika Sukarno mencetuskan sebuah konsep politik yang menggabungkan tiga kekuatan besar yakni Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (NASAKOM). Keselarasan antara pemikiran Sukarno dan komunisme yang anti-imperialisme, menempatkan PKI sebagai pemegang kemudi untuk memobilisasi massa. Terlibatnya orang-orang PKI dalam pemerintahan, tidak jarang membuat mereka menerima penolakan dari golongan Muslim konservatif, militer, dan kekuatan anti-komunis lainnya. Ideologi Komunisme dilarang berkembang di Indonesia setelah terjadinya peristiwa pemberontakan pada 30 September 1965. Dengan demikian nasib Komunisme turut berakhir ketika Sukarno tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra)

Tepat lima tahun setelah Indonesia merdeka, pada 17 Agustus 1950 berdirilah Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang bertujuan untuk menghapuskan budaya peninggalan penjajah seperti feodalisme dan imperialisme serta menciptakan budaya pro-rakyat untuk membentuk identitas bangsa (Zulkifli, 2014: 3). Tidak terlepas dari ajaran Marxisme-Leninisme yang mengutarakan bahwa propaganda merupakan hal yang penting dalam sistem komunis, maka Aidit juga mempergunakan hal tersebut dalam karya kreatif sastra maupun seni. Konsep perjuangan Lekra turut tertuang dalam "Mukaddimah" Lekra yang menjelaskan bahwa "...Rakjat adalah satu-satunya pencipta kebudayaan, dan bahwa pembangunan kebudayaan Indonesia hanya dapat dilakukan oleh rakyat, maka pada 17 Agustus 1950 didirikan Lembaga Kebudayaan Rakyat" (Ismail, 1972: 8). Untuk mewujudkan identitas bangsa yang pro-rakyat tersebut, Lekra menggunakan metode kerja turun ke bawah (Turba) dan asas 1-5-1. Secara singkat, asas 1-5-1 adalah gerakan yang menempatkan politik sebagai panglima dari lima kombinasi kerja yaitu meluas dan meninggi; tinggi mutu ideologi dan tinggi mutu artistik atau 2 tinggi; tradisi baik dan kekinian revolusioner; perpaduan kreativitas individual dan kearifan massa; realisme sosial dan romantik revolusioner.

Sebagai sebuah organisasi, Lekra tidak mengimplementasikan konsep yang hierarkis dan komando terhadap kehidupan kreatif para seniman. Meskipun demikian, dalam tubuh Lekra juga terdapat beberapa jabatan yang memiliki peran penting demi berjalannya organisasi. Jikapun ada struktur hierarkis, maka hal tersebut hanya untuk memudahkan keperluan administrasi dan pengorganisasian yang lebih baik. Adapun struktur kepengurusan dalam Lekra adalah Sekretariat Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Ranting, dan Lembaga Kreatif. Secara lebih kompleks, Lembaga Kreatif milik Lekra terbagi menjadi enam kategori yakni

Lembaga Senirupa Indonesia (Lesupra), Lembaga Film Indonesia (LFI), Lembaga Sastra Indonesia (Lestra), Lembaga Senidrama Indonesia (LSDI), Lembaga Musik Indonesia (LMI), dan Lembaga Senitari Indonesia (Yuliantri dan Muhidin, 2008: 36-38).

Dari lembaga-lembaga kreatif tersebut, Lekra menghasilkan produk budaya yang tidak jarang turut dimuat dalam media massa milik PKI yakni *Harian Rakjat.* Beberapa produk budaya milik Lekra antara lain ialah karya sastra, seperti cerpen, puisi, dan naskah drama yang tentunya pro-rakyat, pro-revolusi, dan anti-imperialisme. Kemudian dalam bidang seni rupa, Lekra juga memproduksi karya seni dengan sentuhan realisme sosialis. Para seniman Lekra seringkali menyuarakan "seni untuk rakyat" dalam berbagai kesempatan, prinsip tersebut diimplementasikan melalui lukisan dengan objek kehidupan rakyat. Diimplementasikannya prinsip tersebut adalah untuk tidak melupakan asal muasal mereka, yakni kalangan rakyat (Jabut, 2017: 46).

Harian Rakjat

Surat Kabar *Harian Rakjat* seringkali dilabeli sebagai media massa milik PKI yang memiliki peran krusial dalam menyebarluaskan ideologi partai. Sebelum ada *Harian Rakjat,* PKI di bawah pimpinan Musso mempunyai majalah yang terbit setiap dua bulan sekali yakni *Bintang Merah.* Tujuan dari diterbitkannya *Bintang Merah* adalah untuk membentuk pandangan rakyat pada komunisme khususnya marxisme-leninisme (Rizky, 2018: 22). Namun dalam perkembangannya, *Bintang Merah* dibredel sekitar tahun 1948 ketika terjadi peristiwa pemberontakan Madiun. Selang beberapa tahun kembali terbit surat kabar dengan gaya yang kekiri-kirian yakni *Harian Rakjat.* Pada tahun 1951 *Harian Rakjat* pertama kali terbit di bawah nama Siauw Giok Tjhan yang bukan merupakan bagian dari struktur PKI. Namun, karena jalan pikirannya serupa dengan PKI, Siauw Giok Tjhan dipercayai untuk memegang *Harian Rakjat.*

Hadirnya *Harian Rakjat* bukan semata-mata untuk kepentingan propaganda kaum Komunis dan pengorganisasian bidang politik, namun juga sebagai mediator kebudayaan rakyat. Dalam pemberitaannya, *Harian Rakjat* tidak terkungkung dalam pemberitaan nasional saja namun juga terbuka terhadap peristiwa internasional yang masih satu ranah dengan isu humanisme, kaum akar rumput, dan revolusi. Mendasarkan ideologinya pada komunisme, *Harian Rakjat* menghadirkan rubrik tetap seperti ruang Marxisme-Leninisme, tinjauan luar negeri, ekonomi dan keuangan, kebudayaan dan pendidikan, serta rubrik khusus yakni "HR Muda," "Ruangan Wanita," "Surat Pembaca," "Arti Kata-kata Asing," "Wong Tjilik," (pojok) dan "Editorial" (Rizky, 2018: 24)

Menjadi media massa yang berada dibawah naungan PKI, pada tahun-tahun politik menjelang pemilihan umum 1955 *Harian Rakjat* menyokong PKI dengan gencar memberitakan PKI merupakan partai yang layak untuk dipilih masyarakat Indonesia daripada partai-partai lainnya. Supaya berhasil mengakumulasi massa untuk memenangkan PKI di kontestasi politik mendatang, *Harian Rakjat* ditujukan untuk mereka yang berasal dari kaum akar rumput seperti buruh dan tani. Demi kesuksesan tersebut, *Harian Rakjat* juga menyatakan bahwa PKI merupakan partai yang layak untuk dipilih, dibandingkan dengan partai-partai lain yang tidak jelas dalam mengkampanyekan diri mereka (Rizky, 2018: 35). Berita yang diterbitkan tiap harinya berhasil memberi persuasi dan menarik simpatistan untuk mendukung PKI. Berkat agitasi dan propaganda yang dilakukan oleh *Harian Rakjat,* PKI berhasil masuk empat besar partai yakni PNI, NU, Masyumi, dan PKI.

Setelah berhasil menyokong PKI untuk mendapatkan suara pada kontestasi pemilihan umum 1955, *Harian Rakjat* masih mempropagandakan paham komunis dalam pemberitaannya. Namun yang semakin digalakkan adalah kritik terhadap pemerintahan, walaupun dikenal dekat dengan Sukarno, bukan berarti *Harian Rakjat* tidak terlepas dari pembredelan. Justru sebaliknya, *Harian Rakjat* lebih sering melakukan kritik terhadap pemerintah. Dalam perkembangannya *Harian Rakjat* mengalami beberapa kali pembredelan yaitu pada tahun 1957 dan 1959 sebelum akhirnya diberhentikan setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965. Dalam edisi terakir pemberitaannya tidak terdapat indikasi yang menandakan persiapan pemberontakan tersebut. Namun, hal yang mengherankan adalah *Harian Rakjat* masih dapat terbit setelah pemberontakan 30 September 1965 tersebut, mengingat bahwa pada 1 Oktober 1965 seluruh surat kabar di ibukota diberhentikan, kecuali surat kabar milik Angkatan Bersenjata dan *Berita Yudha* milik Militer (Yuliantri dan Muhidin, 2008: 101). *Harian Rakjat* yang merupakan salah satu surat kabar berpengaruh pada periode 1950 hingga 1960-an awal, pada September 1965 mengalami kekalahan dan dihentikan penerbitannya pada 3 Oktober 1965. Tidak hanya itu, seluruh anggota yang terafiliasi pun ditangkap, dipenjarakan, bahkan dimusnahkan dengan cara yang tidak manusiawi.

Peristiwa yang Melingkupi Munculnya Cerpen

Cerpen sebagai salah satu karya sastra acapkali dilihat sebagai representasi zamannya. Karya sastra dapat menjadi sumber yang sahih apabila ditempatkan dalam konteks sejarahnya dengan melihat peristiwa apa yang melingkupi karya sastra tersebut. Dalam pengemasannya, cerpen merupakan karya fiksi yang juga mengambil realitas sosial. Sehingga, apabila hendak menggunakan cerpen sebagai sumber atau pandangan sejarah, maka cerpen perlu dikomparasikan dengan sumber yang setara seperti arsip supaya dapat mengonfirmasi peristiwa yang terjadi pada saat itu.

Harian Rakjat selaku media massa milik PKI juga memiliki rubrik khusus yang disediakan untuk kepentingan indoktrinasi partai melalui kebudayaan, yakni rubrik kebudayaan. Rubrik ini hadir sebagai jembatan untuk menyuarakan pemikiran rakyat yang tentunya sejalan dengan garis kerja Lekra, yakni politik adalah panglima. Dengan harapan, kebudayaan yang dipanglimai oleh politik dapat mencapai kemenangan dalam artian kebebasan rakyat dari ketertindasan. Dalam perkembangannya, *Harian Rakjat* juga menyediakan ruangan khusus untuk kebudayaan yang dapat dibuktikan dengan konsistensi terbitannya yang membuat beragam karya kreatif, mulai dari sajak, cerita pendek, esai, sastra, karikatur, hingga seni rupa, dan poster (Yuliantri dan Muhidin, 2008: 96). Dalam penelitian ini diambil empat cerpen yang menggambarkan perjuangan perempuan, yakni *Bibi Kerti, Pengadilan Tani, Atik,* dan *Isteri Kawanku.*

Terlepas dari tujuan untuk meraih kebebasan rakyat, kehadiran rubrik "Kebudajaan" juga bermaksud untuk menunjukkan komitmen dalam membentuk budaya khas Indonesia yang tidak terikat oleh kolonialisme dan feodalisme. Eksistensi ruangan kebudayaan yang disediakan oleh *Harian Rakjat* juga tidak jarang menjadi wadah untuk para pekerja budaya yang karyanya dapat ditemukan sekali dalam sepekan, yakni setiap hari Sabtu. Namun, pada 30 Juni 1963 "Ruangan Kebudajaan" bertransformasi menjadi "HR Minggu" yang dalam penyajiannya terlihat lebih leluasa, karena diisi oleh non-komunis maupun komunis.

Cerpen *Bibi Kerti* karya Putu Oka dimuat pada *Harian Rakjat* 22 November 1964 sebagai respon terhadap kebijakan *landreform* yang berpihak pada petani. Namun, disisi lain para tuan

tanah tidak setuju dengan kebijakan tersebut, sehingga muncullah aksi tani sepihak untuk menuntut kecurangan yang dibuat oleh pada tuan tanah. Cerpen serupa yang muncul sebagai respon peristiwa aksi tani sepihak adalah *Pengadilan Tani* karya Sugiarti Siswadi yang dimuat pada *Harian Rakjat* 12 Juli 1964. Kemudian cerpen berikutnya adalah *Atik* yang dimuat pada *Harian Rakjat* 5 Juli 1958. Peristiwa yang melingkupi cerpen tersebut adalah pemberontakan PRRI yang terjadi di Sumatera. Selanjutnya, cerpen terakhir adalah *Isteri Kawanku* yang dimuat pada *Harian Rakjat* 26 Februari 1955. Adapun peristiwa yang melingkupi cerpen tersebut adalah pemilihan umum 1955.

Perjuangan Perempuan dalam Cerpen

Perjuangan perempuan yang ditampilkan dalam cerpen ini akan dianalisis menggunakan pendekatan Feminisme Marxis untuk membantu melihat peranan rakyat kecil khususnya perempuan yang direpresentasikan dalam cerpen-cerpen tersebut. Cerpen-cerpen yang dimaksud adalah cerpen yang dimuat pada *Harian Rakjat* sebagai salah satu media massa yang sering dilabeli sebagai milik PKI serta tokoh perempuan yang ada dalam cerpen tersebut. Pembahasan akan dibagi menjadi dua topik besar yakni, kaum tani dan tuan tanah serta keluarga. Pengelompokan cerpen ini dibuat berdasarkan pada konteks permasalahan yang ada dalam isi cerpen yang secara langsung mengangkat kisah mengenai tokoh perempuan dalam melawan tuan tanah serta penggambaran peran perempuan dalam keluarga.

Permasalahan kaum tani tidak luput dari pandangan *Harian Rakjat* sebagai media massa yang dipayungi oleh PKI. Munculnya cerpen terkait kaum tani merupakan bentuk respon dari aksi sepihak kaum tani yang terjadi sekitar tahun politik 1959 hingga periode Demokrasi Terpimpin 1964. Aksi tersebut terjadi dalam menanggapi kebijakan *landreform* (reformasi agraria), UUPA dan UUPBH. Dalam pembahasan ini terdapat dua cerpen yang menyoroti polemik perempuan tani dengan tuan tanah yakni *Bibi Kerti* karya Putu Oka yang terbit pada 22 November 1964 dan *Pengadilan Tani* ciptaan Sugiarti Siswadi yang dimuat pada edisi 12 Juli 1965.

Dalam cerpen *Bibi Kerti,* Putu Oka menghadirkan permasalahan diferensiasi sosial dan patriarki. Secara tidak langsung, latar belakang para penulis juga turut melatari penulisan cerpen. Diferensiasi sosial pada cerpen ini dilukiskan dengan Bibi Kerti sebagai seorang perempuan yang memiliki modal (tanah). Lebih lanjut permasalahan tersebut juga menghadirkan sebuah dekonstruksi dari Teori Feminisme Sosialis atau Feminisme Marxis dan juga dekonstruksi dari *kanca wingking*, yang melihat perempuan sebagai kaum borjuis, bukan proletar. Kemudian bentuk perjuangan sekaligus perlawanan perempuan terhadap patriarki dalam cerpen ini dapat dilihat ketika peranan Bibi Kerti yang turut menyumbangkan tenaganya untuk menyediakan makanan, menyembunyikan senjata, serta membantu menguburkan mayat-mayat pejuang yang gugur, namun tidak diberikan rekognisi yang layak.

> " 'Sudah surat veteran tidak dapat, sekarang dirampas pula sawah ini. Mengapa tidak dibunuh saja?'
> 'Mengapa engkau menuntut surat veteran. Kau pikir dengan surat itu kau dapat mempertahankan sawahmu itu?' Sahut Ketut yang sejak tadi memperhatikannya.
> 'Seperti Intaran itu, yang kerjanya tidak karuan pun dapat surat veteran. Aku tidak percaya dia pejuang, dan sekarang mau merampas sawahku. Aku ikut menjadi pembawa surat-surat, membawa bahan makanan, menyembunyikan senjata, bahkan menanamkan mayat-

mayat pemuda-pemuda kita di tengah pertempuran. Tidak ada yang mengingat. Pak Gusti itu kepalanya dulu. Tapi Intaran yang sekarang mau merampas tanahku, juga mengaku pejuang, mendapat surat veteran, aneh! Aku tahu persis sesudah Jepang kalah dia hanya bersembunyi saja di lubang perlindungan.' " (*Harian Rakjat,* 22 November 1964).

Sementara itu, Sugiarti Siswadi dalam cerpennya *Pengadilan Tani* memotret peran perempuan sebagai kaum yang terpuruk. Namun, disisi Sugiarti juga menghadirkan peran ganda (publik dan domestik) perempuan. Penggunaan tokoh perempuan sebagai seorang istri atau ibu dalam cerpennya dapat diinterpretasikan sebagai propaganda ide feminisnya. Secara vokal, Sugiarti menyambung lidah rakyat terkhususkan perempuan. Tokoh perempuan pada cerpen ini digambarkan sebagai seorang janda yang mengalami pemiskinan ekonomi akibat tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Lebih lanjut, peran ganda yang disajikan dalam cerpen ini ditunjukkan dengan Mbok Karti yang menggarap sawah Sanusi sebagai peran publik, sementara itu ia tetap mengurusi anak sebagai peran domestik. Meskipun dalam cerpen ini, Sugiarti tidak secara eksplisit menunjukkan bahwa dirinya menolak patriarki, namun dalam karyanya ia menampilkan ide feminisnya secara persuasif. Sebagai seorang ibu, maka keadaan memaksa Mbok Karti untuk mengambil alih peran seorang 'pemimpin' demi bertahan hidup. Domestikasi pekerjaan yang ditampilkan oleh Sugiarti dalam cerpen ini dapat dilihat dalam potongan cerpen berikut.

"...Mas Darmo bertanya kepadaku, apakah betul-betul aku tidak mempunyai sesuatu untuk dimakan, untuk dijual atau digadai. Hamba menjawab, hanya iga-iga anak yang membayang itulah yang hamba punya. Terus Mas Darmo bertanya, apakah suami hamba almarhum tidak meninggalkan tanah, walau hanya sepatok. Hamba jawab, bahwa memang hamba memegang patuk atas tanah peninggalan suami, tetapi tanah itu sekarang bukan lagi milik hamba; hamba hanya menggarap mertelu. Tetapi tanah itu tidak saya dijual. Pada zaman Jepang, hadi kira-kira duapuluh tahun yang lalu, bapak anak-anak sakit keras, hampir mati. Karena angim membeli selembar nyawanya, hamba berusaha membuka lemari, mencari hutangnya. Dan Sanusi rumahnya jauh dari kediaman saya, mau menghubungi hamba dengan jaminan sawah, hitung-hitung menggade, dengan bunga. Hamba berhasil membeli selembar nyawanya, Pak Hakim." (Yuliantri dan Muhidin, 2008: 451).

Selain permasalahan kaum tani, *Harian Rakjat* juga melakukan indoktrinasi ideologi partai terhadap keluarga yang tercerminkan pada dua cerpen yakni *Atik* yang terbit pada 5 Juli 1958 dan *Isteri Kawanku* yang terbit pada 26 Februari 1955. Dalam cerpen *Atik,* penulis menggambarkan tokoh perempuan sebagai seorang janda yang mampu dalam hal ekonomi. Menjadi seorang janda tidak bisa dilepaskan dari stereotip ketidakmampuan ekonomi dan eksploitasi. Namun demikian, dalam cerpen ini, tokoh perempuan digambarkan sebagai seorang yang gigih dan berdaya. Hal tersebut dapat dilihat dari dialog antara dia dan anaknya, ketika Atik yang hampir setiap saat menanyakan kabar dan menagih janji yang telah dibuat dengan ayahnya.

" 'Mana Bu? Tapi tadi ayah batuk-batuk'
'Bukan, itu bukan ayah Atik. Ayah Atik baru besok pulang dengan membawa baju merah, sepatu merah, dan pita merah.'
Demikian ibunya masih terus berusaha keras membujuk Atik. " (*Harian Rakjat,* 5 Juli 1958).

Terlepas dari dirinya merupakan seorang janda, Rina merupakan seorang perempuan yang memiliki akal dan solusi untuk menghidupi diri dan anaknya. Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit bagaimana ia mendapatkan sepeser uang untuk menghidupi keluarganya tersebut, namun secara implisit cerpen ini memberikan segelintir informasi bahwa tokoh Rina adalah seorang yang berkecukupan dalam ekonomi. Hal tersebut dibuktikan dengan ia mampu membelikan baju yang diinginkan anaknya.

"... Kemudian ia pergi ke kali dan di kali bertemu dengan kawan seorganisasinya. Sebentar ia membicarakan tentang keadaan dirinya yang membutuhkan bantuan. Satu kesimpulan telah didapat. Manis demikian kawannya pergi ke pasar untuk membeli baju merah, sepatu, dan pita merah" (*Harian Rakjat,* 5 Juli 1958).

Terlebih lagi, apabila dilihat dari struktur sosial, cerpen ini tidak menyajikan bentuk diskriminasi terhadap tokoh perempuan yang merupakan seorang janda. Melainkan, dengan memiliki status janda tersebut, tidak mengubah bagaimana bentuk perjuangan tokoh perempuan dalam cerpen. Penulis memberi perspektif baru terhadap *framing* seorang janda yang mampu dalam perekonomian dan juga melakukan peran publik dengan mengikuti organisasi.

Pada cerpen keempat yakni *Isteri Kawanku* yang ditulis oleh Jadi pada edisi 26 Februari 1955, penulis menghadirkan peran ganda perempuan yakni peran domestik sebagai isteri dan peran publik dengan mengikuti organisasi untuk memperbaiki kondisi perempuan baik dalam segi sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Sikap perempuan dalam cerpen ini berubah setelah mendengarkan ceramah Aidit yang menyinggung tentang poligami.

"Setiap Bung Aidit mulai membicarakan soal sikap PKI terhadap soal poligami, program PKI mengenai kaum wanita, isteri kawanku itu menjadi terpaku dan akhirnya dia manggut-manggut karena persetujuannya. Apalagi terhadap seruan, bahwa kaum komunis, kaum nasionalis, dan kaum umat Islam mesti bersatu untuk mengatasi keadaan sekarang. Yang sangat menarik perhatiannya ialah keterangan Bung Aidit tentang bagaimana rasanya seorang wanita jika dimadu, bagaimana perasaan seorang jika mempunyai saudara perempuan (adik atau kakak), mempunyai ibu dimadu. Sekalipun didalam ajaran Islam soal poligami itu dibenarkan, tetapi bagi istri Bung Idrus sendiri tidak dapat membenarkan..." (*Harian Rakjat,* 26 Februari 1955).

Hal yang diperjuangkan tokoh perempuan dalam cerpen ini adalah hak untuk mendapatkan kedudukan yang setara dengan kaum laki-laki dengan dapat melakukan peran publik, yang kemudian dipaparkan dalam potongan dialog berikut:

"Sebenarnya saya ini secara diam-diam menjadi anggota organisasi Muslimat dari Masyumi. Tetapi hingga sekarang ini saya belum pernah mendapatkan bimbingan

> bagaimana kita mesti melakukan perjuangan untuk membela nasib dan menjunjung derajat kaum wanita. Yang saya dapat dari Muslimat hanyalah hasutan-hasutan mengenai komunis…Aku sekarang sudah sadar bahwa aku mesti keluat dasi Muslimat, karena disitu bagiku tak ada keuntungan apa-apa. Tetapi kalau aku mesti memilik PKI aku masih belum bisa atau belum sanggup. Tetapi saya sebaiknya tak tahu, mesti masuk organisasi apa yang sosok dengan cita-citaku. Bagaimana pendapatmu? Saya dengar disini ada organisasi wanita Gerwani, tetapi aku sendiri belum tahu bagaimana azas tujuan dan program perjuangannya." (*Harian Rakjat,* 26 Februari 1955).

Feminisme secara global memandang perempuan sebagai seorang yang memiliki aktivitas dan inisiatif sendiri demi kepentingan memperjuangkan hak maupun kepentingannya dalam berbagai bentuk gerakan, salah satunya melalui organisasi. Kendala yang dihadapi perempuan, memotivasi perempuan untuk keluar dari keterpurukan akibat sistem yang telah ditetapkan oleh kali-laki dengan melakukan sebuah tindakan perlawanan seperti protes untuk melawan diskriminasi yang dialaminya (Urfan dan Cintya, 2023: 3). Dalam cerpen ini, aspek sosial dapat dilihat dari keinginan seorang individu bergabung dalam organisasi yang memiliki target serupa. Sementara itu, aspek politik juga turut dipertontonkan dengan indoktrinasi bahwa ideologi Marxis memberikan wadah bagi kaum perempuan untuk berjuang melawan ketidaksetaraan gender.

Sebagai kaum yang tidak diuntungkan dalam sektor sosial, ekonomi, dan politik, usaha kaum perempuan dalam mendapatkan kesetaraan bukanlah hal yang mudah. Dari keempat cerpen di atas, ditemukan irisan permasalahan yang saling bersinggungan, yakni perjuangan kelas yang terpotret dalam konflik kaum tani dengan tuan tanah serta perjuangan kaum perempuan untuk memperoleh kesetaraan hak dalam kehidupan.

KESIMPULAN

Terlepas dari media massa digunakan sebagai media propaganda untuk kepentingan tertentu, dipilihnya *Harian Rakjat* adalah karena koran tersebut peduli terhadap kaum terpinggirkan, bahkan perempuan. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa sejarah kerap kali hanya menyoroti 'permukaannya' saja, seperti orang-orang besar yang memiliki kekuasaan. Tidak dapat dipungkiri juga, bahwa mayoritas orang-orang yang berkuasa adalah laki-laki, sementara itu peranan perempuan hampir tidak pernah disorot. Lebih lanjut, kepedulian *Harian Rakjat* terhadap kaum terpinggirkan dibuktikan dengan cerpen yang acap kali mengangkat tema-tema yang menyuarakan kaum kecil dan perempuan, sejalan dengan konsep realisme-sosialis. Dalam penelitian ini dipilih empat cerpen yang memiliki implikasi sebagai penyambung lidah masyarakat bawah dan menempatkan tokoh perempuan sebagai sosok yang berkomitmen tinggi dan berdaya. Keempat cerpen tersebut yaitu *Bibi Kerti* karya Putu Oka, *Pengadilan Tani* karya Sugiarti Siswadi, *Isteri Kawanku* karya Jadi dan *Atik* karya Koe Iramanto.

Menjadi perempuan bukanlah suatu hal yang mudah, bahkan dapat dikatakan seorang perempuan perlu berusaha dua kali lipat untuk mendapatkan kesetaraan hak dengan kaum laki-laki. Representasi tokoh perempuan dalam cerpen-cerpen Lekra erat kaitannya dengan ideologi PKI. Dalam hal ini, PKI hendak menampilkan bahwa perempuan juga memiliki peranan penting dalam perjuangan revolusioner. Terlepas dari ideologi partai yang mempengaruhi cerpen, maka dapat dikatakan bahwa penggambaran tokoh perempuan mendapatkan sudut pandang baru.

Sebagaimana perempuan digambarkan sebagai sosok yang aktif dalam perjuangan kelas dengan mengikuti gerakan buruh tani. Lebih lanjut, perempuan juga dicitrakan sebagai sosok yang mampu menjalankan peran publik maupun domestik secara mandiri. Sehingga, tidak jarang apabila penggambaran tokoh perempuan dalam beberapa cerpen tersebut divisualkan sebagai sosok yang berani, berdaya, dan aktif. Namun demikian, dalam cerpen-cerpen yang diteliti juga memiliki keterbatasan yakni dengan pelabelan gender perempuan itu sendiri. Para perempuan dalam cerpen *Harian Rakjat* dibingkai sebagai korban dari sistem imperialisme, kolonialisme dan feodalisme yang tidak luput dari penindasan dan diskriminasi. Terlebih lagi, representasi perempuan dalam cerpen masih terikat pada stereotip gender tertentu yang mayoritas menggambarkan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang mengurusi anak, rumah, maupun urusan domestik lainnya.

Dari keempat cerpen yang diteliti, dua dari cerpen tersebut menampilkan sebuah dekonstruksi terhadap istilah *kanca wingking,* yakni cerpen *Atik* dan *Bibi Kerti*. Dekonstruksi tersebut muncul pada cerpen *Bibi Kerti* ketika tokoh perempuan memiliki modal, yakni tanah. Mengingat pada kondisi kultural masyarakat tadisional, perempuan tidak memiliki hak dalam memiliki sebuah tanah maupun modal. Sementara itu, dalam cerpen *Atik* tokoh perempuan digambarkan sebagai seorang yang memiliki hak dalam pengambilan keputusan. Dengan dilakukannya penelitian ini, dapat diketahui bahwa cerpen dapat difungsikan sebagai alat bagi para penulis untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang tidak terdengar, mengkritik pemerintah, indoktrinasi, maupun sebagai senjata perlawanan. Tidak menutup kemungkinan bahwa, cerpen yang merupakan salah satu karya sastra memiliki pengaruh yang kuat dalam menggiring opini masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Surat Kabar

Harian Rakjat, 26 Februari 1955.
Harian Rakjat, 5 Juli 1958.
Harian Rakjat, 22 November 1964.

Buku

Aidit, D. N.. 1955. *Lahirnja PKI dan Perkembangannja*. Jakarta: Yayasan PEMBARUAN.
Anonim. 1954. *Konstitusi Partai Komunis Indonesia*. Jakarta: CC PKI.
Foulcher, Keith. 2021. Komitmen Sosial dalam Sastra dan Seni Sejarah Lekra 1950-1965. Bandung: Pustaka Pias.
Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wancana
Ismail, Yahya. 1972. *Pertumbuhan Perkembangan dan Kejatuhan Lekra*. Kuala Lumpur: Percetakan Khee Meng.
Zulkifli, Arif. et. al. ed. 2014. *Lekra dan Geger 1965.* Jakarta: PT Gramedia.

Artikel Jurnal

Hidayani, Fika dan Isriani Hardini. 2016. "Citra Kaum Perempuan di Hindia Belanda." *MUWAZAH* 8(1): 98-105.

Kurniawan, Adi. Anindya Prameswari, dan Yustina Sri Ekwandari. 2022. "Irigasi dan Pendidikan Politik Etis di Kota Metro." *The Indonesian Journal of Social Studies,* 6(2): 40-47.

Kurniawan, Hendra. 2014. "Nyai dalam Pergundikan" *HISTORIA VITAE* 28(2): 136-153.

Syarif, Mujar I. 2016. "Spirit Piagam Jakarta dalam Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Cita Hukum* 4(1): 15-32.

Urfan, Muhammad Yahdi dan Cintya Nurika Irma. 2023. "Analisis Feminisme Marxis pada Tokoh Utama dalam Novel "Re" Karya Maman Suherman" *Seminar Nasional Pendidikan* 1:220-230.

Skripsi

Jabut, Theresia. 2017. *Lekra dalam Perkembangan Politik di Indonesia 1950-1965.* (Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma). Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Rizky, Punta. 2018. *Surat Kabar Harian Rakjat sebagai Sarana Kampanye Politik Partai Komunis Indonesia Tahun 1951-1955*. (Skripsi Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.